



2022

Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah
(LKj-IP)

**Dinas Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat
Kota Dumai**

Jalan S.M. Amin No. 39 Kota Dumai,
Telp/Fax 0765-31592

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim.....

Segala puji bagi Allah *Subbhana Wa Ta'ala* yang telah memberikan syafa'at dan karuniaNya sehingga tersusun Laporan Kinerja (Lkj) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun Anggaran 2022. Penyusunan LKj merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Dinas Sosial Kota Dumai kepada publik atas pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tahun anggaran 2022. Selain itu LKj juga merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Penyusunan LKj ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai mendukung visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu ***“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”***. Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai menjalankan misi ke 1 (satu) yaitu ***“Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri”*** dan misi ke 3 ***“Mewujudkan infrastruktur wilayah yangberkualitas”***.

Program dan kegiatan yang dianggarkan pada tahun 2022 telah dilaksanakan dengan baik, namun demikian bukan berarti dalam pelaksanaannya tidak ada permasalahan. Upaya-upaya pembenahan strategis dalam mempertahankan dan memperbaiki kinerja terus dilakukan dengan harapan adanya kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai.

Akhirnya, dengan semangat transparansi untuk memberikan kontribusi terbaik, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai akan terus berusaha untuk membangun kultur organisasi yang lebih transparan. Semoga dokumen ini memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai.

Dumai, Januari 2023
KEPALA DINAS

drg. HERMIYATI
Pembina Utama Muda
NIP. 19711229 200012 2 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai disusun dengan maksud memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program dan kegiatan berbasis kinerja, sebagaimana terdapat dalam Penetapan Kinerja Tahun 2021 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Pemerintah Kota Dumai Dalam tahun 2021 - 2026. Laporan ini berisi penetapan kinerja dan akuntabilitas kinerja, dimana termasuk didalamnya akuntabilitas keuangan, analisis kinerja dan evaluasi kinerja guna menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya yang telah dilakukan dan tingkat capaian dari target pada tingkat sasaran program.

Dalam penyusunan LKj Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai disajikan tentang keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran, tujuan dan target yang telah ditetapkan dalam Penjanjian Kinerja, sehingga diperlukan pola pengukuran kinerja mulai Rencana Strategis, dan berakhir sampai dengan pengukuran kinerja atas sasaran program kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK). Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Pemerintah Kota Dumai Tahun 2021 - 2026, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai mempunyai 3 (tiga) sasaran strategis yang kemudian dijabarkan dalam 8 (delapan) Program. Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai berdasarkan persentase capaian kinerja baik yang berbasis sasaran.

Dalam konteks pengklasifikasikan tingkat keberhasilan diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dapat dinyatakan berhasil. Memperhatikan pada tingkat capaian kinerja tersebut, dilaksanakan evaluasi terhadap program-program yang belum optimal dalam suatu koridor atas serangkaian perbandingan capaian kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir membandingkan dengan tahun sebelumnya guna memperkuat formulasi komparatif yang komperhensif.

Masih dalam konteks ini, hal tersebut diorientasikan pula untuk menjadi bagian yang terintegrasi dalam suatu upaya konstruktif dan berkelanjutan guna mengoptimalkan dan menyempurnakan kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat di waktu yang akan datang.

Dumai, Januari 2023
KEPALA DINAS

drg. HERMIYATI
Pembina Utama Muda
NIP. 19711229 200012 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
C. Isu Startegis.....	2
D. Struktur Organisasi	2
E. Dasar Hukum.....	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	
A. Visi.....	6
B. Misi.....	8
C. Tujuan	9
D. Sasaran.....	10
E. Strategi, arah kebijakan, program dan indikator RPJMD Tahun 2016-2021 Strategi untuk mencapai misi.....	12
F. Arah Kebijakan.....	12
G. Program dan Indikator Sasaran Prioritas.....	13
H. Perjanjian Kinerja.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	16
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	17
C. Realisasi Anggaran.....	28
BAB IV PENUTUP	30

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang efektif dan efisien melalui bidang pembangunan dan kemasyarakatan yang maju dan sejahtera merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah yang diwujudkan di antaranya dengan merumuskan kebijakan serta pembinaan di bidang Sosial Kemasyarakatan. Kinerja pembinaan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai di evaluasi guna mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan diharapkan kedepannya selalu mengalami perubahan yang signifikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah telah mengatur bahwa semua instansi pemerintah diamanatkan untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh tersebut dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP).

Untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran di bidang sosial kemasyarakatan baik selaku pelaksanaan regulasi maupun koordinator pembinaan di tengah masyarakat, maka disusun Laporan Kinerja (LKj) yang menggambarkan keberhasilan, kekurangan maupun permasalahan dan kendala yang dihadapi selama tahun anggaran 2022 berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai tahun anggaran 2022.

B. Maksud dan Tujuan

LKj merupakan media pertanggungjawaban/dokumen yang berisi gambaran, perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistemik dan melembaga.

➤ Maksud Penyusunan LKj adalah:

1. Sebagai penjabaran dari visi dan misi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
2. Sebagai barometer/tolok ukur keberhasilan/kegagalan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi Pemerintah.

➤ Tujuan Penyusunan LKj adalah :

1. Untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan visi dan misi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.
2. Untuk memberikan gambaran kinerja Satuan Perangkat Daerah/ Instansi Pemerintah .

C. Isu Strategi

Berikut ini kami sampaikan beberapa isu strategis pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022 antara lain:

1. Indikator sasaran kinerja SKPD belum sepenuhnya menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai urusan wajib sesuai dengan Permensos Nomor 09 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 18 tahun 2020.
2. Tidak terpenuhinya penerapan SPM pada kegiatan SKPD adalah lebih kepada keterbatasan anggaran sehingga penerapan SPM tidak maksimal.
3. Belum adanya panti rehabilitasi sosial penyandang cacat dan trauma center sebagai wadah pelayanan dan rehabilitasi bagi anak terlantar, anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

4. Perlunya bantuan dari Jaminan sosial serta perlindungan sosial bagi korban bencana, orang terlantar, korban tindak kekerasan, serta Advokasi Sosial.
5. Perlunya pengembangan sumber daya Pegawai dan kerjasama serta Koordinasi pelaksanaan Kegiatan.

D. Struktur Organisasi

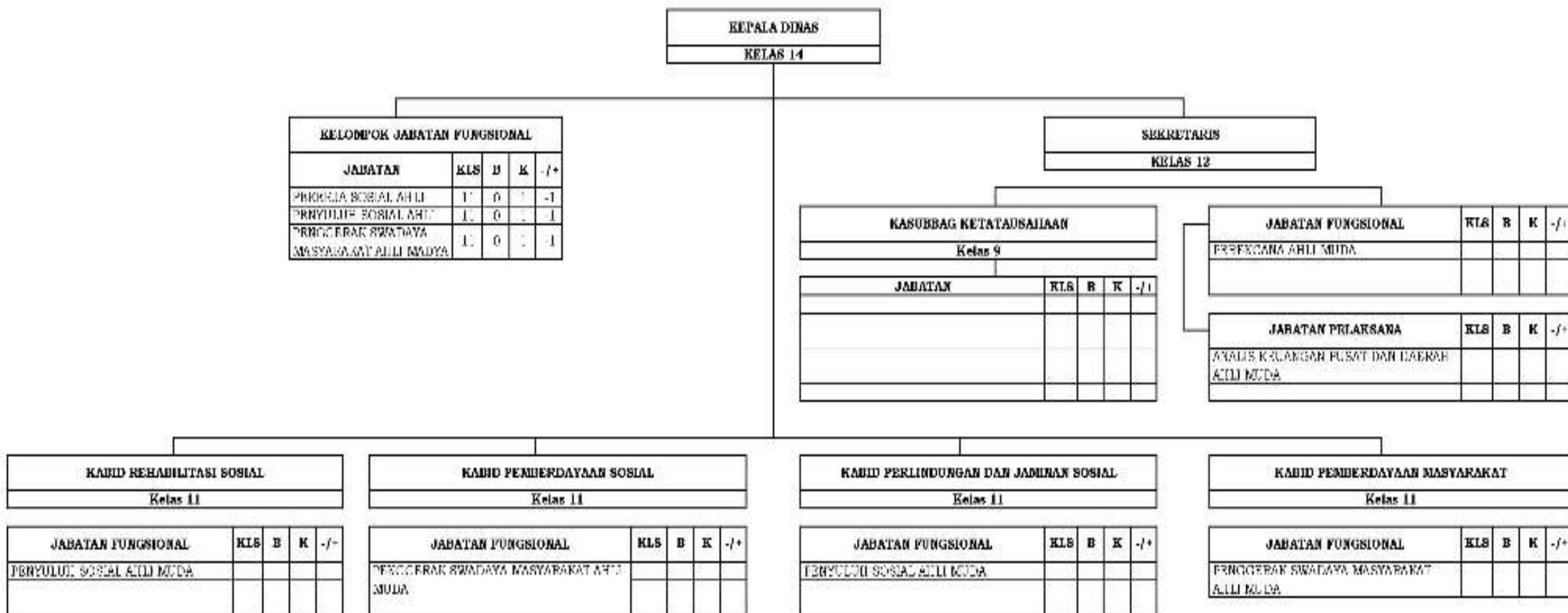
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai terdiri dari :

1. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
2. Sekretariat Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat :
 - a. Subbagian Ketatausahaan, Keuangan dan Aset
 - b. Jabatan Fungsional Perenca Ahli Muda
 - c. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
3. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial membawahi :
 - a. Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Muda
4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi :
 - a. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
5. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi :
 - a. Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Muda
6. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat :
 - a. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DUMAI
 NOMOR 34 TAHUN 2022 TANGGAL 27 MEI 2022
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL DAN
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI

BAGAN ORGANISASI DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI



E. Dasar Hukum

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2016.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Riau Tahun 2019-2024;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor 717 tanggal 22 Mei 1999 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai;
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran

Pemerintah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D

12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 2 Seri A Noreg .48.A/2022)
14. Peraturan Walikota Dumai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 1 Seri D)
15. Peraturan Walikota Dumai Nomor 75 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan Kota Dumai;
16. Peraturan Walikota Dumai Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 33 Seri E)
17. Peraturan Walikota Dumai Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 2 Seri D)
18. Peraturan Walikota Dumai Nomor 98 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah I Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 16 Seri B)
19. Revisi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021-2026 per 29 Agustus 2022

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan pandangan ke depan yang menggambarkan arah, dan tujuan yang ingin dicapai guna menyamakan komitmen seluruh pihak yang berkepentingan dalam menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan Kota Dumai.

Adapun **Visi** pembangunan Kota Dumai adalah :

“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”

Secara filosofi, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

- 1) Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera dengan indikator keberhasilan adalah laju pertumbuhan ekonomi.

Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ini adalah:

- a) Meningkatnya perekonomian dan daya saing daerah dengan indikator keberhasilan yaitu nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan PDRB perkapita.
 - b) Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai dengan indikator keberhasilan yaitu tingkat kemiskinan, Indeks Gini dan Tingkat Pengangguran Terbuka.
 - c) Terjaminnya ketersediaan pangandaerah dengan indikator keberhasilan yaitu ketersediaan pangan utama.
- 2) Membangun masyarakat Dumai yang Produktif, berdaya saing dan sejahtera dengan indikator keberhasilan adalah indeks pembangunan manusia (IPM). Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ini adalah:

- a) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks Kesehatan.
 - b) Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks Pendidikan.
 - c) Meningkatnya standard hidup layak masyarakat Kota Dumai dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks Pengeluaran.
 - d) Meningkatnya penerapan budaya melayu dengan indikator keberhasilan Jenis Budaya melayu yang diterapkan.
- 3) Mewujudkan infrastruktur dan ruang Kota Dumai yang berkualitas dan berwawasan lingkungan dengan indikator keberhasilan adalah Indeks Infrastruktur Kota Dumai dan Cakupan wilayah penanganan bencana. Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ini adalah:
- a) Meningkatnya infrastruktur Kota dengan indikator keberhasilan yaitu tingkat pelayanan infrastruktur daerah.
 - b) Terwujudnya penataan ruang daerah yang konsisten dengan indikator keberhasilan yaitu Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan aturan.
 - c) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks kualitas lingkungan Hidup, penurunan emisi gas rumah kaca, Cakupan pelayanan persampahan dan Cakupan Jenis Bencana Daerah yang diselesaikan
- 4) Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan indikator keberhasilan adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ini adalah:
- a) Meningkatnya akuntabilitas Pemerintah Daerah dengan indikator keberhasilan yaitu Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah setiap tahun dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.
 - b) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat, dan Indeks layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

B. Misi

Untuk merealisasikan visi Pembangunan Kota Dumai di atas, Maka ditetapkan Misi pembangunan kota Dumai sebagai berikut:

Misi – 1 : Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri dengan Strategi :

- 1) Peningkatan Perekonomian kota melalui optimalisasi peran seluruh stakeholder.
- 2) Peningkatan Produktivitas masyarakat.
- 3) Peningkatan Daya saing daerah dan Iklim berusaha.
- 4) Peningkatan perlindungan sosial.
- 5) Peningkatan Peluang Kerja Bagi Masyarakat.
- 6) Peningkatan Koordinasi dan sinergitas lintas sektor untuk ketersediaan pangan daerah.

Misi – 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjati diri Melayu dengan Strategi:

- 1) Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang merata dan berkualitas.
- 2) Peningkatan pelayanan pendidikan masyarakat yang merata dan berkualitas.
- 3) Peningkatan daya beli Masyarakat.
- 4) Peningkatan penerapan budaya melayu di kehidupan masyarakat dan pemerintahan.

Misi – 3 : Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas dengan Strategi:

- 1) Peningkatan aksesibilitas dan mobilitas antar wilayah.
- 2) Peningkatan sistem pengendalian banjir Kota Dumai.
- 3) Peningkatan kuantitas dan kualitas kawasan perumahan dan permukiman.
- 4) Peningkatan kualitas sanitasi perumahan dan permukiman.
- 5) Peningkatan kerjasama daerah dalam pembangunan infrastruktur.

- 6) Peningkatan kinerja sistem penyediaan air bersih kota Dumai.
- 7) Mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.
- 8) Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari.
- 9) Optimalisasi upaya penanganan saat kejadian bencana.
- 10) Optimalisasi penanganan pasca kejadian bencana.

Misi – 4 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan daerah yang baik dengan strategi:

- 1) Peningkatan Profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 2) Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 3) Pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien berbasis IT.

Untuk mendukung Misi pembangunan Kota Dumai, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menjalankan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ke 1 (Satu) dan Ke 3 (Tiga) yaitu:

- ✓ ***“ Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri “***
- ✓ ***“ Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas “***

C. Tujuan yang hendak dicapai dalam 5 tahun

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menetapkan Tujuan sebagai berikut:

1. Persentase ppks yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.
2. Nilai evaluasi perkembangan desa dan kelurahan (epdeskel).
3. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota.

D. Sasaran yang hendak dicapai dalam 5 tahun

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, Dinas Sosial menetapkan Sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
2. Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan.
3. Meningkatnya Penanggulangan Korban Bencana.

Tabel. 2.1
Sasaran Strategis RPJMD Kota Dumai Tahun 2022 – 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET					KONDISI TERAKHIR
					Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2025	Thn 2026	
1.	Misi I: Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri Strategi: 1. Peningkatan perlindungan sosial	- Persentase ppks yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	NA	100	100	100	100	100	100
		- Nilai evaluasi perkembangan desa dan kelurahan (epdeskel)	%	NA	> 201-350	> 201-350	> 201-350	> 351	> 351	> 351
2.	Misi III: Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas Strategi: 1. Optimalisasi upaya penanganan saat kejadian bencana. 2. Optimalisasi penanganan pasca kejadian bencana.	- Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan sosial dan pemberdayaan masyarakat diukur melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Ada 4 indikator yang ditetapkan sebagai indikator Indikator Kinerja Utama (IKU) bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat yang harus dicapai mulai tahun 2022 s/d 2026 seperti pada tabel berikut ini :

Tabel. 2.2
Indikator Kinerja Utama (iku) Dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat kota dumai tahun 2021 – 2026

TUJUAN	SASARAN	IKU SASARAN PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TARGET				
				2022	2023	2024	2025	2026
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	PERSENTASE PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, DAN GELANDANGAN PENGEMIS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI LUAR PANTI (INDIKATOR SPM)	%	100	100	100	100	100
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN	MENINGKATNYA KAPASITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN	PERSENTASE PENGENTASAN DESA/KELURAHAN TERTINGGAL (KURANG BERKEMBANG)	%	47	42	36	30	25
		PERSENTASE LPM (LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT) BERPRESTASI/AKTIF	%	100	100	100	100	100
MENINGKATKAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA	MENINGKATNYA PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA	PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA DAERAH KAB/KOTA (INDIKATOR SPM)	%	100	100	100	100	100

E. Strategi, arah kebijakan, program dan indikator RPJMD Tahun 2021-2026

Strategi untuk mencapai misi

Strategi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 6 (enam) tahun melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam

kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 6 (enam) tahun.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dalam melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran menerapkan strategi yaitu yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Adapun sasaran dari tujuan, Meningkatkan Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, dan Meningkatkan Penanggulangan Korban Bencana.

F. Arah kebijakan untuk mencapai misi

Kebijakan yang dijadikan pedoman dan petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai tahun 2022, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pelayanan dasar bagi warga miskin.
2. meningkatkan jaminan sosial bagi masyarakat yang mempunyai masalah kesejahteraan sosial.
3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana yang terintegrasi dan lintas sectoral.
4. Meningkatkan koordinasi penanganan bagi masyarakat terdampak bencana.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada prinsipnya adalah mengurangi populasi penyandang masalah dan meningkatkan peran aktif pemerintah dan masyarakat dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial.

G. Program dan Indikator Sasaran Prioritas (jumlah program sesuai dengan perjanjian kinerja)

Program yang ditetapkan merupakan program yang berada dalam lingkup kebijakan sebagaimana diuraikan pada Dokumen Rencana Strategis. Sasaran Prioritas Program SKPD yang berada pada Program Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial ada 5 Program
2. Meningkatkan Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan ada 2 Program
3. Meningkatkan Penanggulangan Korban Bencana ada 1 Program

H. Perjanjian Kinerja



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : drg. HERMIYATI

Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA DUMAI

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : H. PAISAL, SKM, MARS

Jabatan : WALIKOTA DUMAI

Selaku atasan langsung *Pihak Pertama*

Selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab *Pihak Pertama*.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua
H. PAISAL, SKM, MARS

Dumai, 14 Oktober 2022
Pihak Pertama

drg. HERMIYATI
Pembina Utama Muda
NIP.19711229 200012 2 001

Lampiran Pembahasan Pejalan Kinerja
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Sasaran	Target Tahunan
				2022
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhannya Dasar-dasar Diluar Panti (Indikator SPW)	%	100
2	Meningkatnya Penanggulangan Korban Bencana	Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhannya Dasar-dasar Pada Saat Dan Seleleh Tanggap Darurat Bencana Daerah Kab/Kota (Indikator SPW)	%	100
3	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Tertinggal (Kurang Berkembang)	%	100
		Persentase LPM (LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT) Berprestasi/aktif	%	100

Sasaran :	Meningkatnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	1. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	243.143.040
		1.1 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	243.143.040
		2. PROGRAM PENANGAMAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	4.699.597
		2.1 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dan Tindak Debatansi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	4.699.597
		3. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	287.308.065
		3.1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar	287.308.065
		4. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	128.230.000
		4.1 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	28.200.000
		4.2 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000
	Meningkatnya Penanggulangan Korban Bencana	5. PROGRAM PENANGAMAN BENCANA	376.881.200
		5.1 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan	226.921.200
		5.2 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	149.960.000
		6. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	208.952.160
		6.1 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	208.952.160
	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	7. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	10.000.000
		7.1 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	10.000.000
		8. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	503.000.000
		8.1 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	503.000.000
		JUMLAH	1.738.984.000

Dumai, Oktober 2022

Pihak Kedua
WALIKOTA DUMAI

H. PAISAL, SKM, MARS

Pihak Pertama
KEPALA

drg. HERMIYATI
 NIP. 19711229 200612 2 001

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas pada hakikatnya merupakan suatu kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan suatu organisasi kepada pihak yang berhak atau memiliki kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban. Sedangkan kinerja instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan Pemerintah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan telah melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dibuat sesuai dengan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada sesuai dengan visi dan misi organisasi.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No.	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1.	Nilai dibawah 55	kurang
2.	Nilai ≥ 55 s/d < 70	cukup
3.	Nilai ≥ 70 s/d < 86	baik
4.	Nilai ≥ 86 s/d < 100	sangat baik
5.	Nilai ≥ 100	memuaskan

Nilai realisasi kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Presentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- b. Apabila Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian rencana tingkat capaian, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Presentase Capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah. Adapun capaian kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Sasaran Strategis beserta target dan realisasi
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai
Tahun 2022

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Realisasi Tahunan	Capaian Tahunan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kesejahteraan sosial	- Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100
2	Meningkatkan Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	- Persentase pengentasan desa/kelurahan tertinggal (kurang berkembang)	%	47	73	155

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Realisasi Tahunan	Capaian Tahunan
1	2	3	4	5	6	7
	Desa/Kelurahan					
		- Persentase Ipm (lembaga pemberdayaan masyarakat) berprestasi/aktif	%	100	100	100
3	Meningkatkan Penanggulangan Korban Bencana	- Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota	%	100	100	100

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai
Tahun 2022

NO	Indikator	2022			Target akhir Renstra (2026) (%)	Realisasi Akhir Target Renstra 2026 (%)
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)		
1	2	4	5	6	7	8
1	- Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	100	100	100	100
2.	- Persentase pengentasan desa/kelurahan tertinggal (kurang berkembang)	47	73	155	25	292

NO	Indikator	2022			Target akhir Renstra (2026) (%)	Realisasi Akhir Target Renstra 2026 (%)
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)		
3.	- Persentase lpm (lembaga pemberdayaan masyarakat) berprestasi/aktif	100	100	100	100	100
4.	- Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota	100	100	100	100	100

Dari Tabel Pengukuran Kinerja Renstra Tahun 2022 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

- c. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti, target tahun 2022 adalah 100%, capaian di tahun 2022 adalah 100% Jadi target di tahun ini dikatakan tercapai.
- d. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase pengentasan desa/kelurahan tertinggal (kurang berkembang), target tahun 2022 adalah 47% capaian tahun 2022 adalah 73% atau sebesar 155% jadi target di tahun ini dikatakan tercapai.
- e. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase lpm (lembaga pemberdayaan masyarakat) berprestasi/aktif, Target tahun 2022 adalah 100% capaian tahun 2022 adalah 100% Jadi target di tahun ini dikatakan tercapai.
- f. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota, Target tahun 2022 adalah 100%, capaian tahun 2022 adalah 100%. Jadi target di tahun ini dikatakan tercapai.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian tahun ini (2022) dengan tahun lalu (2021);

Sehubungan dengan terjadinya perubahan IKU Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang berdasarkan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 yang berbeda dengan IKU Dinas Sosial pada RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 – 2021, sehingga tidak bisa di dilakukan perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan tahun 2021. Perbedaan IKU dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan antara IKU 2016-2021 dengan IKU 2022-2026
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai

No	IKU 2016-2021		IKU 2022-2026	
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial - Persentase PMKS yang tertangani - Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar - Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat - Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial 	Meningkatnya kesejahteraan sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti

No	IKU 2016-2021		IKU 2022-2026	
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
2.			Meningkatkan Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase pengentasan desa/kelurahan tertinggal (kurang berkembang) - Persentase lpm (lembaga pemberdayaan masyarakat) berprestasi/aktif
3.			Meningkatkan Penanggulangan Korban Bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini (2022) dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

- a. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti;
Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 adalah 100% atau capaian sebesar 100% dari target yang ditetapkan.
- b. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase pengentasan desa/kelurahan tertinggal (kurang berkembang);
Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 adalah 155% atau capaian sebesar 292% dari target yang ditetapkan.
- c. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase lpm (lembaga pemberdayaan masyarakat) berprestasi/aktif;

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 adalah 100% atau capaian sebesar 100% dari target yang ditetapkan.

- d. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota;

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 adalah 100% atau capaian sebesar 100% dari target yang ditetapkan.

4. Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja atau permasalahan dan alternatif solusi yang telah dilakukan;

Keberhasilan/Peningkatan pencapaian indikator pada sasaran meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, dan meningkatkan penanggulangan korban bencana, ditopang oleh dukungan dan kerjasama yang baik oleh seluruh pegawai yang ada pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dan adanya dukungan dari Kepala Daerah serta koordinasi yang baik dengan instansi terkait;

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja adalah sebagai berikut;

Capaian kinerja program yang baik tersebut, didukung oleh program/kegiatan :

- a. Program Pemberdayaan Sosial

Untuk pelaksanaan program ini, pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 243.143.040,- dan terealisasi sebesar Rp. 242.556.708,- atau 99,76%. Adapun realisasi Kegiatan/Sub Kegiatan dari pelaksanaan Program Pemberdayaan Sosial adalah sebagai berikut:

- Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab./Kota. Sub kegiatannya adalah :
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kab./Kota. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 221.598.720,- dengan realisasi

penyerapan anggaran sebesar Rp. 221.163.588,- atau 99,80% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Persentase Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota yang memperoleh penguatan kapasitas dalam penanganan PMKS.

- Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota. Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp.21.544.320,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.21.393.120,- atau 99,30% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Persentase TKSK Kewenangan Kabupaten /Kota yang memperoleh penguatan kapasitas dalam penanganan PMKS.

b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Untuk pelaksanaan program ini, pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 4.699.507,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.486.000,- atau 95,46%. Adapun realisasi kegiatan/sub kegiatan dari pelaksanaan Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan adalah sebagai berikut :

- Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal. Sub kegiatannya adalah :
 - Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.4.699.507,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.486.000,- atau 95,46 % dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten /Kota ke Desa/Kelurahan Asal.

c. Program Rehabilitasi Sosial

Untuk pelaksanaan program ini, pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 1.442.608.095,- dan terealisasi sebesar Rp. 790.537.687,- atau 54,80 %. Adapun realisasi kegiatan/sub kegiatan dari pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial adalah sebagai berikut:

- Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial. Sub kegiatannya adalah :
 - Penyediaan Permakanan. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 19.684.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.19.386.300,- atau 98,49% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Persentase Makanan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.
 - Penyediaan Sandang Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 3.210.210,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.3.160.000,- atau 98,44% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Persentase Sandang Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.
 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 3.199.507,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.3.175.000,- atau 99,23% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Persentase Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga.
 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.131.511.107,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.131.265.000,- atau 99,81% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Persentase Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Penyandang

Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.

- Pemberian Layanan Kedaruratan. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.1.180.082.557,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.528.898.500,- atau 50,46% dari anggaran. Hal ini dikarenakan pemberian bantuan sosial yang pada awalnya direncanakan untuk 2 (dua) bulan bagi masing-masing penerima manfaat bersumber dari anggaran DID. Anggaran DID ini dikururkan pada bulan Desember sehingga mengakibatkan bantuan sosial tersebut diubah menjadi 2 (dua) tahap untuk tahun selanjutnya yang berpengaruh terhadap penyerapan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Persentase Pemberian Layanan Kedaruratan.
- Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga. Anggaran tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.3.199.507,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.3.175.000,- atau 99,23% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Persentase Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga.
- Pemberian Layanan Rujukan. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 101.721.207,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.101.477.887,- atau 99,76% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Persentase Pemberian Pelayanan Rujukan.

d. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial.

Untuk pelaksanaan program ini, pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp.128.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 126.531.488,- atau 98,70%.

Adapun realisasi kegiatan/sub. kegiatan dari pelaksanaan Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial adalah sebagai berikut:

- Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar. Sub kegiatannya adalah :

- Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 28.200.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 26.998.069,- atau 95,74% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Persentase anak terlantar yang terpantau pemeliharaannya.
- Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota. Sub kegiatannya adalah :
- Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.99.533.419,- atau 99,53% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Persentase fakir miskin cakupan daerah kab/kota.
- e. Program Penanganan Bencana.
- Untuk pelaksanaan program ini, pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 376.081.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 357.401.870,- atau 95,03%.
- Adapun realisasi kegiatan/sub. kegiatan dari pelaksanaan Program Penanganan Bencana adalah sebagai berikut:
- Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota. Sub kegiatannya adalah :
- Penyediaan Makanan. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 95.069.700,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.94.306.500,- atau 99,20% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Persentase makanan korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten /Kota.
 - Penyediaan Sandang. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 41.851.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 33.865.000,- atau

80.92% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Persentase sandang korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten /Kota.

- Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.90.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.83.100.000,- atau 92,33% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Persentase Kelompok Rentan yang tertangani secara khusus.
- Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota. Sub kegiatannya adalah:
 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 149.160.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 146.130.370,- atau 97,97% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Persentase Taruna Siaga Bencana yang diberdayakan.

f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Untuk pelaksanaan program ini, pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 208.952.160,- dan terealisasi sebesar Rp. 207.736.988,- atau 99,42%.

Adapun realisasi kegiatan/ sub. kegiatan dari pelaksanaan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan adalah sebagai berikut:

- Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota. Sub kegiatannya adalah :
 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 11.660.400,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 10.951.100,- atau 93,92% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Persentase Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten /Kota yang dipelihara.

- Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 197.291.760,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 196.785.888,- atau 99,74% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Petugas pengamanan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

g. Program Administrasi Pemerintahan Desa.

Untuk pelaksanaan program ini, pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.870.000,- atau 98,70%.

Adapun realisasi kegiatan/ sub. kegiatan dari pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut:

- Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa. Sub kegiatannya adalah :
 - Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 10.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 9.870.000,- atau 98,70% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.

h. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat.

Untuk pelaksanaan program ini, pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 500.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 497.635.191,- atau 99,53%.

Adapun realisasi kegiatan/ sub. kegiatan dari pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut:

- Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat

Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota. Sub kegiatannya adalah :

- Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 500.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 497.635.191,- atau 99,53% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah persentase kegiatan kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat.

C. Realisasi Anggaran

Dari hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulan IV Tahun 2022 terhadap program rencana kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun Anggaran 2022, realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis sebesar Rp. 6.821.356.900,- dari jumlah anggaran Rp. 7.744.573.947,- atau 88,08% dari target yang ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Gambaran realisasi kinerja dan anggaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.5
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai
Tahun 2022

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja			Program	Keuangan		
				Target	Realisasi	Capaian		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kesejahteraan sosial	- Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.	%	100	100	100	- Program pemberdayaan sosial. - Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan. - Program rehabilitasi sosial. - Program perlindungan dan jaminan sosial. - Program pengelolaan taman makam pahlawan.	243.143.040 4.699.507 1.442.608.095 128.200.000 208.952.160	242.556.708 4.486.000 790.537.687 126.531.488 207.736.988	99,76% 95,46% 54,80% 98,70% 99,42%
2	Meningkatkan Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	- Persentase pengentasan desa/kelurahan tertinggal (kurang berkembang).	%	47	73	155	- Program administrasi pemerintahan desa	10.000.000	9.870.000	98,70%
		- Persentase lpm (lembaga pemberdayaan masyarakat) berprestasi/aktif.	%	100	100	100	- Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga Adat dan masyarakat hukum adat	500.000.000	497.635.191	99,53%

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja			Program	Keuangan		
				Target	Realisasi	Capaian		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
3	Meningkatkan Penanggulangan Korban Bencana	- Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota.	%	100	100	100	- Program penanganan bencana	376.081.200	211.271.500	93,10%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 merupakan uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai pada tahun anggaran 2022. Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban kepada publik terhadap kinerja atau hasil yang telah dicapai serta upaya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik, terpercaya dan akuntabel.

Meskipun secara umum Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai telah melaksanakan program dan kegiatannya dengan baik, namun demikian bukan berarti dalam pelaksanaannya tidak ada permasalahan, hambatan maupun kekurangan baik yang bersifat khusus dan teknis. Adapun permasalahan atau kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Belum semua kegiatan/program sesuai atau merujuk kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan urusan wajib Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
2. Kurangnya jumlah staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai pelaksana teknis.
3. Belum tercukupinya anggaran dari APBD Kota Dumai Tahun 2022.
4. Belum tercapainya Realisasi anggaran disalah satu Sub kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan dikarenakan di karenakan dikucurkan pada bulan desember sehingga berpengaruh terhadap penyerapan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai masih diperlukan perbaikan dari berbagai bidang untuk meningkatkan kinerja yang telah dicapai. Dalam mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai, diharapkan adanya kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat antara lain dalam bentuk:

1. Perlu adanya dukungan dana yang memadai agar program dan sasaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik dan terarah.
2. Evaluasi kegiatan dalam hal pencapaian keluaran, hasil dan manfaat serta pencapaian terhadap kelompok sasaran.
5. Diperlukan adanya peningkatan dalam sistem pengumpulan data sehingga setiap hasil/outcome dari kegiatan atau program yang dilaksanakan dapat terlihat dan tergambar dalam setiap laporan hasil kegiatan/program yang akhirnya tercantum dalam laporan pertanggungjawaban kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai.
6. Monitoring secara terus menerus untuk melihat progres dari capaian kegiatan yang dilaksanakan.
7. Untuk meningkatkan prestasi kerja diperlukan penambahan fasilitas kerja antara lain fasilitas komputer disetiap Bidang dan Bagian, serta penambahan jumlah pegawai yang saat ini masih dirasakan kurang.

Dengan adanya upaya-upaya pemecahan masalah tersebut diharapkan permasalahan yang sama tidak akan muncul di tahun-tahun mendatang sehingga capaian kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai akan meningkat.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa LKJ.IP Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2022 ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan penyusunan laporan ini pada tahun-tahun mendatang. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi dan pedoman dalam meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

**RENCANA KERJA TAHUNAN
TAHUN 2022
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kesejahteraan sosial	- Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100
2	Meningkatkan Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	- Persentase pengentasan desa/kelurahan tertinggal (kurang berkembang)	%	47
		- Persentase lpm (lembaga pemberdayaan masyarakat) berprestasi/aktif	%	100
3	Meningkatkan Penanggulangan Korban Bencana	- Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota	%	100

Dumai, Januari 2022
Kepala,

Drg. HERMIYATI
NIP. 19711229 200012 2 001

**RENCANA AKSI
TAHUN 2022
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Target Pelaksanaan				Program	Indikator Program	Target	Pagu
					TW I	TW II	TW III	TW IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya kesejahteraan sosial	- Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.	%	100	25	25	25	25	<ul style="list-style-type: none"> - Program pemberdayaan sosial. - Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan. - Program rehabilitasi sosial. - Program perlindungan dan jaminan sosial. - Program pengelolaan taman makam pahlawan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang diberdayakan. - Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/ Kelurahan Asal. - Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang tertangani di Luar Panti Sosial. - Persentase pmks yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial - Persentase pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 100% 100% 100% 100% 	<ul style="list-style-type: none"> 243.143.040 4.699.507 1.442.608.095 128.200.000 208.952.160
2	Meningkatkan Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	- Persentase pengentasan desa/kelurahan tertinggal (kurang berkembang).	%	47		20		27	<ul style="list-style-type: none"> - Program administrasi pemerintahan desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa 	100%	10.000.000
		- Persentase lpm (lembaga pemberdayaan							<ul style="list-style-type: none"> - Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga Adat dan masyarakat hukum adat 	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat 	100%	500.000.000

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Target Pelaksanaan				Program	Indikator Program	Target	Pagu
					TW I	TW II	TW III	TW IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		masyarakat) berprestasi/aktif.	%	100	25	25	25	25		Daerah Provinsi serta Masyarakat Hukum adat yang masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama		
3	Meningkatkan Penanggulangan Korban Bencana	- Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota.	%	100	25	25	25	25	- Program penanganan bencana	- Persentase jumlah korban bencana alam dan sosial kab/kota yang tertangani	100%	376.081.200

Dumai, Januari 2022
Kepala,

Drg. HERMIYATI
NIP. 19711229 200012 2 001

**PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Realisasi Tahunan	% Capaian	Program	Keuangan		
								Pagu (Rp)	Realisasi (%)	(%) Capaian
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kesejahteraan sosial	- Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.	%	100	86,99	86,99	- Program pemberdayaan sosial. - Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan. - Program rehabilitasi sosial. - Program perlindungan dan jaminan sosial. - Program pengelolaan taman makam pahlawan.	243.143.040 4.699.507 1.442.608.095 128.200.000 208.952.160	242.556.708 4.486.000 790.537.687 126.531.488 207.736.988	99,76% 95,46% 54,80% 98,70% 99,42%
2	Meningkatkan Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	- Persentase pengentasan desa/kelurahan tertinggal (kurang berkembang).	%	47	25	53,19	- Program administrasi pemerintahan desa	10.000.000	9.870.000	98,70%
		- Persentase Ipm (lembaga pemberdayaan masyarakat) berprestasi/aktif.	%	100	100	100	- Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga Adat dan masyarakat hukum adat	500.000.000	497.635.191	99,53%
3	Meningkatkan Penanggulangan Korban Bencana	- Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota.	%	100	100	100	- Program penanganan bencana	376.081.200	211.271.500	93,10%
				Rata-rata capaian		85,045	Rata-rata capaian		92,43 %	

Kepala,

Drg. HERMIYATI
NIP. 19711229 200012 2 001